
PENDIDIKAN DAN PENGENTASAN KEMISKINAN DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SDGs)

Aan Zulyanto

Universitas Muhammadiyah Bengkulu

aanzulyanto@gmail.com

ABSTRACT

The aim of the research is to provide an overview of how education and expenditure on education functions can alleviate poverty as an effort to achieve sustainable development goals (SDGs). The method used is documentation with sources of information derived from previous research articles. Result show that Educational capacity building and poverty alleviation are still the main goals of sustainable development/SDGs. In several countries, especially poor countries, the achievement of educational capacity to achieve the MDGs has not been achieved and is the main agenda in the SDGs.

***Keywords:** Education¹, Poverty², Sustainable Development Goals³*

PENDAHULUAN

Pada tahun 2000 PBB menggagas adanya skema pembangunan abad millennium atau Millenium Development Goals (MDGs) dan berakhir pada tahun 2015. Skema MDGs focus pada upaya pengentasan kemiskinan, kelaparan, kesehatan, pendidikan, ketidaksetaraan gender dan kelestarian lingkungan. Tahun 2012 dilaporkan bahwa MDGs berhasil dilakukan di beberapa Negara anggota PBB (Lisbet, 2013). Meskipun demikian di beberapa Negara berkembang dan Negara miskin cukup terseok-seok mengejar delapan target tersebut. Pada tahun 2015 PBB kembali mengadakan siding dan memutuskan untuk melanjutkan skema MDGs menjadi Sustainable Development Goals (SDGs), tujuan utama SDGs sendiri adalah mengakhiri kemiskinan, mencapai kesetaraan dan mengatasi perubahan iklim di tahun 2030. SDGs berisikan 17 tujuan dan 169 sasaran. Perhatian terhadap pengentasan kemiskinan dan penerapan MDGs telah banyak dilakukan baik secara global maupun nasional diantaranya adalah (Asadullah and Savoia 2018).

Pengentasan kemiskinan masih menjadi sasaran utama dalam pembangunan ekonomi suatu Negara. Dalam upaya pengentasan kemiskinan terdapat beberapa faktor yang menentukan salah satunya melalui peningkatan pendidikan. Penelitian yang melihat bagaimana keterkaitan antara pendidikan dengan pengentasan kemiskinan telah banyak dilakukan. (Faisala et al. 2020) meneliti bagaimana pendidikan non formal dapat mengentaskan kemiskinan di daerah perdesaan. (Cremin and Nakabugo 2012) yang mengkritisi pendidikan, pembangunan dan pengentasan kemiskinan, (Harber 2002) yang

mengeklporasi antara pendidikan, politik dan pengentasan kemiskinan di Afrika, (Hofmarcher 2021) yang melihat bagaimana pengaruh pendidikan terhadap kemiskinan dalam perspektif Eropa, (Awan et al. 2011) dan (Wedgwood 2007).

Adapun pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan dilakukan oleh (Liu, Yu, and Wang 2015), (Filho et al. 2021) yang menyatakan kemiskinan merupakan hambatan utama dalam implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan. (Tarabini and Jacovkis 2012) menganalisa strategi penanggulangan kemiskinan melalui hubungan antara pendidikan dan kemiskinan.

Tujuan dari penelusuran artikel ini adalah untuk melihat bagaimana peranan pendidikan dalam mengurangi kemiskinan dalam pencapaian SDGs.

TINJAUAN PUSTAKA

Banyak penelitain telah menunjukkan hubungan yang kuat antara kemiskinan dan tingkat pendidikan. Pendidikan merupakan kunci utama untuk mengembangkan individu, rumah tangga dan masyarakat. Tingkat pendidikan yang rendah dan penguasaan keterampilan yang buruk akan menghambat pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya akan memperlambat pengurangan kemiskinan (UNESCO 2017).

Standar pendidikan suatu masyarakat akan menentukan tingkat keberhasilannya dalam menangani isu-isu kompleks untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan; tingkat pendidikan akan berpengaruh secara langsung dan mempengaruhi pencapaian SDGs (Kolb, Fröhlich, and Schmidpeter 2017), (Avelar, Silva-Oliveira, and Pereira 2019). SDGs merupakan agenda pembangunan berkelanjutan yang harus dilaksanakan oleh semua negara pada tahun 2030 (PBB, 2018). Pendidikan yang berkualitas (Tujuan 4) bertujuan tidak hanya untuk menyediakan pendidikan yang inklusif dan merata, tetapi juga untuk mempromosikan kesempatan belajar, yang dijadikan sebagai prioritas dalam pembangunan berkelanjutan.

Awan et al. (2011) menyatakan pendidikan dan kesehatan individu merupakan komponen yang diperlukan dan sangat penting dalam pembentukan modal manusia untuk menjadi produktif dan meningkatkan taraf hidup. Pendidikan dan pengentasan kemiskinan memiliki hubungan yang linier dengan pendidikan dan penghasilan, Selain itu yang menentukan kemiskinan adalah kepala keluarga yang buta huruf atau berpendidikan rendah.



Gambar 1. Impact of business schools on SDGs

Sumber : Korlb, Frohlich, Schmidpeter (2017)

Pendidikan berpotensi besar memberikan dampak pada peningkatan maupun pengurangan kemiskinan. Pada tingkat individu, anak-anak dengan pendidikan yang buruk memiliki kesempatan yang tidak setara untuk perkembangan mereka, dan pada tingkat masyarakat, Negara yang memiliki sistem pendidikan yang rendah akan sulit untuk mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas.

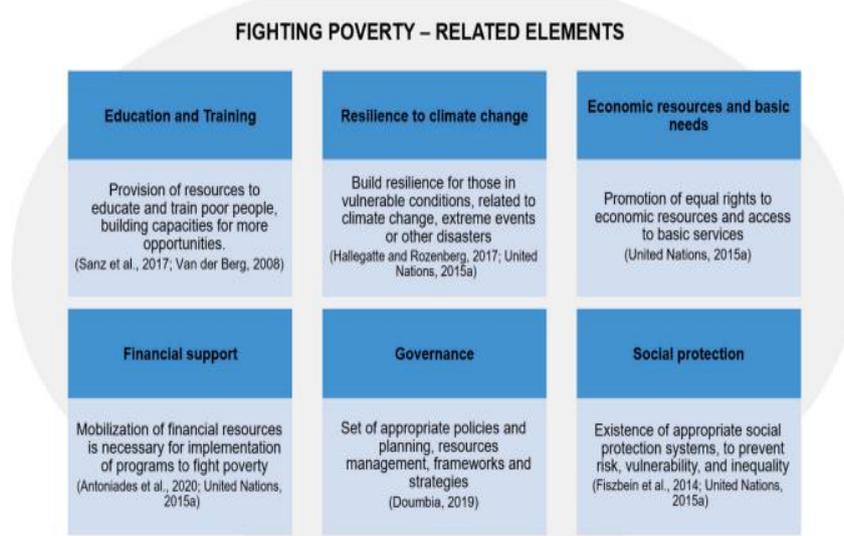


Fig. 1. Main elements related to the process of fighting poverty and what they entail.

Source: based on Antoniades et al. (2020), Dombia (2019), Fiszbein et al. (2014), Hallegatte and Rozenberg (2017), Sanz et al. (2017), United Nations (2015a), Van der Berg (2008).

Sumber : (Filho et al. 2021).

Deklarasi Incheon menggambarkan pendidikan sebagai “hak asasi manusia yang mendasar dan dasar untuk menjamin realisasi hak-hak lain”. Pendidikan yang berkualitas (Tujuan 4) adalah kunci untuk mencapai semua SDG. Unesco menyoroti itu sebagai cara paling efektif untuk memenuhi semua SDGs untuk bertindak menuju berkelanjutan perkembangan. Pendidikan berada di garis depan setiap perkembangan dari sekolah dasar hingga pendidikan tinggi dan pembelajaran sepanjang hayat. UNESCO mendefinisikan Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan sebagai sumber pemberdayaan bagi peserta didik "untuk mengambil keputusan dan tindakan yang bertanggung jawab untuk integritas mental lingkungan, kelangsungan ekonomi dan masyarakat yang adil, untuk sekarang dan masa depan generasi, dengan tetap menghormati keragaman budaya” (UNESCO, 2018) dalam (Žalėnienė and Pereira, 2021).

Reformasi di bidang pendidikan ditujukan untuk pengentasan kemiskinan melalui pembentukan modal manusia (human capital) seperti yang ditentukan oleh OECD. Lauder & Cheung (2018) memandang bahwa investasi pendidikan dianggap sebagai suatu pandangan yang baik untuk mengurangi kemiskinan melalui peningkatan pendidikan dan akan mempersempit perbedaan tingkat upah (Brown and James, 2020).

Tanzania memberikan contoh yang jelas bahwa menyekolahkan anak sendiri tidak cukup untuk pengurangan kemiskinan. Seperti halnya dengan banyak sekolah PDU tahun 1980-an, pendidikan yang tersedia bagi mayoritas melalui SEDP mungkin tidak cukup bernilai untuk menyediakan jalan keluar yang efektif dari kemiskinan (Wedgwood, 2007).

Aisa, Larramona, and Pueyo (2019) menganalisa determinan kemiskinan di kalangan pekerja di Eropa berdasarkan jenis kelamin, menggunakan data untuk 25 negara yang diperoleh dari Uni Eropa Database Statistik Pendapatan dan Kondisi Hidup (EU-SILC), untuk periode 2010 sampai 2013. Studi kami mengungkapkan bahwa homogenitas ini hanya dangkal; wanita harus dalam posisi yang relatif lebih baik, karena mereka memiliki tingkat pendidikan tinggi yang lebih tinggi, tetapi ini keuntungan menghilang ketika mereka mengakses pasar, karena sebagian besar pekerjaan paruh waktu adalah ditempati oleh wanita. Asimetri berdasarkan jenis kelamin juga ada di antara pekerjaan, tetapi bukan antara pekerja tetap dan tidak tetap

METODE PENELITIAN

Tulisan ini bersifat deskriptif dimana tujuan penelitian adalah memberikan gambaran bagaimana pendidikan dan belanja fungsi pendidikan dapat mengentaskan kemiskinan sebagai upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Metode yang digunakan adalah dokumentasi dengan sumber informasi berasal dari artikel-artikel penelitian terdahulu.

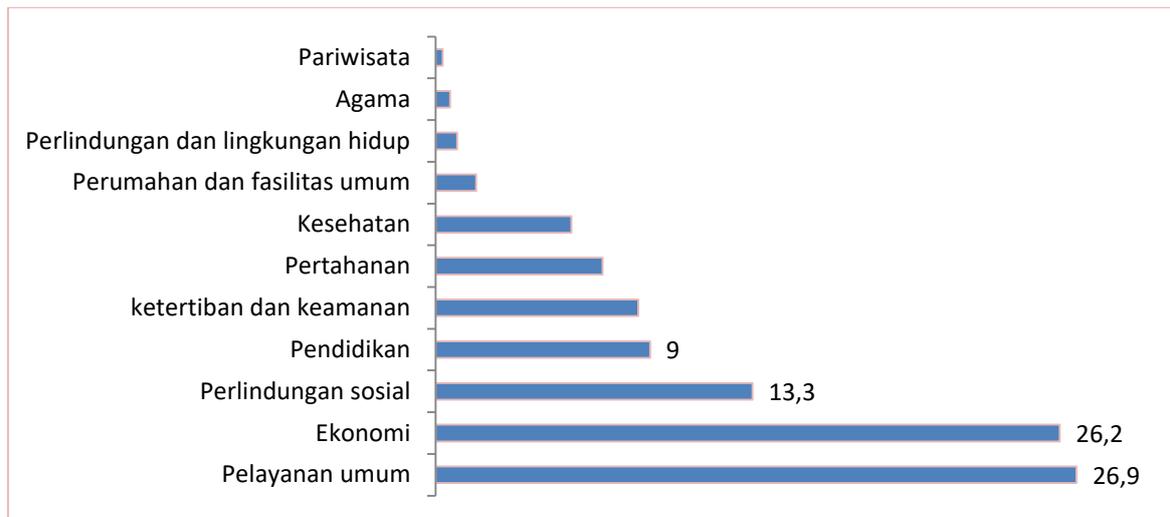
HASIL DAN PEMBAHASAN

Tantangan pengentasan kemiskinan terus meningkat seiring dengan laju pengentasan kemiskinan melambat dalam beberapa tahun terakhir. Dari tahun 2008 hingga 2015, tingkat kemiskinan menurun pada tingkat tahunan sebesar 0,8%, sedangkan antara 2015 dan 2019 tingkat penurunannya hanya 0,31% per tahun (Nugroho et al., 2021).

Hasil studi Odior (2014) yang bertujuan untuk melihat apakah pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan pengentasan kemiskinan di Nigeria melalui analisis keseimbangan simulasi mikro. Disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah secara substansi akan mengurangi kemiskinan, oleh karena itu maka pertumbuhan ekonomi di masa yang akan datang harus pro poor. Investasi dalam pendidikan merupakan salah satu program pemerintah yang berkebijakan pro poor untuk meningkatkan modal manusia atau kualitas manusia yang pada akhirnya akan mengurangi kemiskinan.

Di Indonesia Alokasi anggaran bagi pendidikan terus dipertahankan sebesar 20 persen dari APBN, anggaran digunakan pada peningkatan kualitas pengajar, pembangunan sekolah di pelosok wilayah Indonesia, pengembangan pembelajaran, dan bagaimana metode pembelajaran yang cocok di zaman sekarang. Penggelontoran dana pendidikan diharapkan mampu meningkatkan kemampuan literasi, matematika, dan sains sehingga anak-anak dapat terus melanjutkan pendidikannya (N.S. Isnaini, 2020).

Dukungan pemerintah Indonesia akan pengentasan kemiskinan dan peningkatan pendidikan tercermin dalam belanja fungsi. Belanja fungsi yang pro poor dalam mengentaskan kemiskinan cukup tinggi. Belanja fungsi untuk program pengentasan kemiskinan dinatanya adalah belanja fungsi pendidikan, kesehatan, ekonomi, perlindungan social dan perumahan & fasilitas umum.

Grafik 1. Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi

Sumber : (Kemenkeu 2021) data diolah.

Selain tertuang dalam APBN, setiap daerah pun memiliki porsi belanja fungsi. Peran pendidikan dapat menanggulangi kemiskinan, sesuai tujuan SDGs agar kemiskinan dapat ditekan sekecil mungkin. Anggaran pendidikan terus ditingkatkan dan TNP2K berupaya membuat program seperti dana BOS, BSM, dan PKH yang bertujuan untuk mengurangi jumlah anak putus sekolah sebesar 4,5 juta anak dan penuruna kemiskinan. Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan skill, dapat memberikan efek multiplier, karena pendidikan tinggi membuat wawasan seseorang luas dan dapat bersaing dalam dunia kerja. Seseorang dengan pendidikan tinggi cenderung memiliki pendapatan yang tinggi juga. Sehingga konsumsi akan meningkat dan kemiskinan dapat menurun.

Pendidikan mengurangi ketimpangan dan kemiskinan secara langsung, yaitu: dengan meningkatkan produktivitas bagi golongan miskin, memperbaiki kesempatan mereka untuk memperoleh pekerjaan dengan upah yang lebih baik. Berbicara tentang kemiskinan, terdapat banyak sebab yang dapat membuat seseorang menjadi miskin, terutama jika dilihat dari pandangan hidup dan sikap terhadap pekerjaan. Selain dari faktor pendidikan, pandangan hidup, dan gaya hidup tersebut di atas, masih ada faktor-faktor lain yang menyebabkan seseorang menjadi miskin, antara lain : tingkat upah yang rendah, sedikitnya lapangan kerja, meningkatnya harga-harga barang, dan sebagainya. Selain dari faktor pendidikan, pandangan hidup, dan gaya hidup tersebut di atas, masih ada faktor-faktor lain

yang menyebabkan seseorang menjadi miskin, antara lain : tingkat upah yang rendah, sedikitnya lapangan kerja, meningkatnya harga-harga barang, dan sebagainya.

Pendidikan muncul sebagai strategi pembangunan yang hampir tak terbantahkan untuk mengatasi beberapa bentuk kesenjangan sosial, politik, ekonomi dan geografis di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Namun tidak demikian dengan Uganda. Investasi yang signifikan dan reformasi kebijakan dalam pendidikan (seperti Pendidikan Dasar dan Menengah Universal) sejak 1997, tidak membuahkan hasil yang diharapkan sehubungan dengan pengurangan kemiskinan melalui investasi sumber daya manusia. Kemajuan dalam pengentasan kemiskinan tidak hanya stagnan tetapi peran pendidikan di dalamnya sangat sederhana. Uganda mengungkapkan bahwa saat ini strategi untuk mengurangi kemiskinan berkisar pada agenda pembangunan berbasis asimilasi yang kuat, dengan demikian berfokus pada tiga bidang intervensi utama: (a) peningkatan akses ke pendidikan dan retensi; (b) peningkatan kualitas pendidikan; dan (c) penciptaan lapangan kerja melalui pendidikan (Datzberger, 2018).

Hasil empirik dalam penelitian Saleh (2002) faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan per propinsi di Indonesia adalah indeks pembangunan manusia (terdiri dari pendapatan perkapita, angka harapan hidup, rata-rata bersekolah), investasi fisik pemerintah daerah, tingkat kesenjangan pendapatan, tingkat partisipasi ekonomi dan politik perempuan, populasi penduduk tanpa akses terhadap fasilitas kesehatan, populasi penduduk tanpa akses terhadap air bersih, dan krisis ekonomi. Beberapa implikasi kebijakan yang dapat dilakukan adalah berikut ini. Pertama, peningkatan kualitas pengembangan manusia melalui peningkatan pendapatan, fasilitas pendidikan dan kesehatan. Kedua, di saat bersamaan dilakukan kebijakan yang dapat mendukung pemertaan pendapatan. Ketiga, investasi fisik dilakukan secara merata dengan prioritas pada kawasan-kawasan padat keluarga miskin. Keempat, pemerataan kesempatan bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam sektor-sektor informal ekonomi dan politik, sektor di mana sebagian besar keluarga miskin berasal.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan maka dapat disimpulkan bahwa peningkatan kapasitas pendidikan dan pengentasan kemiskinan masih merupakan tujuan utama dari pembangunan yang berkelanjutan/ SDGs, Kemudian peranan pemerintah dalam

peningkatan kapasitas pendidikan untuk mengentaskan kemiskinan masih menjadi focus utama. Di beberapa Negara terutama Negara miskin, pencapaian kapsitas pendidikan untuk mencapai MDGs dan belum tercapai dan menjadi agenda utama dalam SDGs

KETERBATASAN DAN REKOMENDASI

Tulisan hanya bersifat deskriptif dengan menggunakan sumber penelitian terdahulu yang berasal dari artikel-artikel jurnal. Penelitian lanjutan dapat dilakukan dengan menjadikan pendidikan dan pembangunan manusia sebagai determinan pengurangan kemiskinan di suatu wilayah objek penelitian, sehingga peran pendidikan secara langsung dalam pencapaian SDGs dapat lebih diaplikasikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisa, R., Larramona, G., & Pueyo, F. (2019). Poverty in Europe by Gender: The Role of Education and Labour Status. *Economic Analysis and Policy*, 63, 24–34.
- Asadullah, M. N., & Savoia, A. (2018). Poverty Reduction during 1990–2013: Did Millennium Development Goals Adoption and State Capacity Matter?, *World Development*, 105:70–82.
- Avelar, A.B.A., Silva-Oliveira, K.D.d., & Pereira, R.d.S. (2019). Education for Advancing the Implementation of the Sustainable Development Goals: A Systematic Approach. *International Journal of Management Educatio*, 17(3), 100322.
- Awan, Ma., Malik.N., Sarwar, H., & Waqas, M. (2011). Impact of Education on Poverty Reduction. *International Journal of Academic Research* 3(1).
- Brown, P., & James, D. (2020). Educational Expansion, Poverty Reduction and Social Mobility: Reframing the Debate. *International Journal of Educational Research* 100, 101537.
- Cremin, P., & Nakabugo, M.G. (2012). Education, Development and Poverty Reduction: A Literature Critique. *International Journal of Educational Development*, 32(4). 499-506.
- Datzberger, S. (2018). Why Education Is Not Helping the Poor. Findings from Uganda.” *World Development*, 110,124–39.
- Faisal, F., Risal, A., Hardianto, H., & Elihami,E. (2020). Nonformal Education and Reduction of Poverty in Rural Areas. *Jurnal Edukasi Nonformal*, 1(1),106-114.
- Harber, C. (2002). Education, Democracy and Poverty Reduction in Africa. *Comparative Education*, 38(3), 267-276.
- Hofmarcher, T. (2021). The Effect of Education on Poverty: A European Perspective.” *Economics of Education Review*, 83, 102124.

- Kemenkeu. (2021). Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara 2021. *Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran*, 1–48.
- Kolb, M., Fröhlich, L., & Schmidpeter, R. (2017). Implementing Sustainability as the New Normal: Responsible Management Education – From a Private Business School’s Perspective. *International Journal of Management Education*, 15(2), 280–92.
- Filho, W.L., Lovren, V.O., Will, M., Salvia, A.L., & Frankenberger, F. (2021). Poverty: A Central Barrier to the Implementation of the UN Sustainable Development Goals. *Environmental Science and Policy*, 125, 96–104.
- Liu, Q.Q., Yu.M., & Wang, X.L. (2015). Poverty Reduction within the Framework of SDGs and Post-2015 Development Agenda. *Advances in Climate Change Research* 6(1), 67-73.
- Isnaini, N.S., & Azizah, F. Z. (2020). Pentingnya Pendidikan Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Indonesia. *Researchgate.Net* (August).
- Nugroho, A., Amir, H., Maududy, I., & Marlina, I. (2021). Poverty Eradication Programs in Indonesia: Progress, Challenges and Reforms. *Journal of Policy Modeling* 43(6):1204–1224.
- Odiro, E.S.O. (2014). Government Expenditure on Education and Poverty Reduction: Implications for Achieving the MDGs in Nigeria: A Computable General Equilibrium Micro-Simulation Analysis. *Asian Economic and Financial Review*, 4(2).
- Lisbet, S. (2013). Pencapaian Millenium Development Goals (MDGs). 4(1), 129–56.
- Tarabini, A., & Jacovkis, J. (2012). The Poverty Reduction Strategy Papers: An Analysis of a Hegemonic Link between Education and Poverty. *International Journal of Educational Development*, 32(4), 507–16.
- UNESCO. (2017). Reducing Global Poverty through Universal Primary and Secondary Education. *Global Education Monitoring Report* (June).
- Wedgwood, R. (2007). Education and Poverty Reduction in Tanzania. *International Journal of Educational Development*, 27(4), 383-396.
- Žalėnienė, I., & Pereira, P. (2021). Higher Education For Sustainability: A Global Perspective. *Geography and Sustainability*, 2(2), 99-106.